UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Manajemen Konflik Dualisme Pusat Pemerintahan di Kabupaten Buton Utara
Inan Fauziyah, Dr. Indah Surya Wardhani, S.Sos., M.Sc
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Pertanyaan Penelitian 6
D. Kajian Pustaka 6
1. Perencanaan Ruang: Konsensus dan Kuasa 6
2. Pemicu Konflik Ruang Terbuka 7
3. Inisiatif dan Strategi Pengelolaan Konflik Spasial 8
4. Rasa Memiliki dan Hak Atas Kota 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Manfaat Penelitian 12
G. Kerangka Teori 13
H. Metode Penelitian 18
1. Pendekatan dan Desain Penelitian 18
2. Teknik Pengumpulan Data 19
3. Teknik Analisis Data 23
I. Sistematika Penulisan 25
BAB II KONTEKS PENELITIAN: DUALISME PUSAT PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BUTON UTARA **28**
A. Profil dan Karakteristik Wilayah Kabupaten Buton Utara 28
B. Sejarah Penentuan Ibu Kota Kabupaten Buton Utara 33
1. Legitimasi Historis dan Kultural Ereke sebagai Pusat Kulisusu 33
2. Proses Pemekaran Kabupaten Buton Utara dan Penetapan Buranga ... 35
3. Tarik Ulur Penentuan Ibu Kota Kabupaten Buton Utara 39
C. Konstelasi Aktor dalam Kelompok Buranga dan Kelompok Ereke 42
1. Kelompok Buranga 42
2. Kelompok Ereke 43
BAB III PROSES PENGELOLAAN KONFLIK DUALISME PUSAT PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BUTON UTARA **45**
A. Ridwan Zakaria Periode Pertama (2010–2015): Pelembagaan Ereke sebagai Pusat Pemerintahan 49
1. Membangun Konfigurasi Politik Pemerintahan Ridwan Zakaria 49

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Manajemen Konflik Dualisme Pusat Pemerintahan di Kabupaten Buton Utara
Inan Fauziyah, Dr. Indah Surya Wardhani, S.Sos., M.Sc
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2. Pelembagaan Ereke melalui Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan 51
3. Konflik Tahun 2011 sebagai Konsekuensi Pemusatan Penyelenggaraan Pemerintahan 53
4. Strategi Hukum melalui Mahkamah Konstitusi 55
5. Strategi Penataan Ruang melalui RTRW Tahun 2012 57
6. Implikasi Pemerintahan Ridwan Zakaria terhadap Dualisme Pusat Pemerintahan 59

B. Abu Hasan (2016–2021): Mengelola Dualisme melalui Keseimbangan Politik Buranga dan Ereke 60
1. Membangun Konfigurasi Politik Pemerintahan Abu Hasan 60
2. Penyelenggaraan Pemerintahan di Buranga sebagai Upaya Menjaga Legalitas Ibu Kota 62
3. Pemerataan Pembangunan sebagai Instrumen Keseimbangan Wilayah65
4. Pelembagaan Tokoh Lokal sebagai Instrumen Stabilitas Politik 66
5. Implikasi Pemerintahan Abu Hasan terhadap Dualisme Pusat Pemerintahan 68

C. Ridwan Zakaria Periode Kedua (2021–2025): Mengupayakan Pemindahan Ibu Kota melalui Mekanisme Legislasi 69
1. Membangun Konfigurasi Politik Pemerintahan Ridwan Zakaria Periode Kedua 69
2. Mengajukan Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 70
3. Implikasi Kebijakan Rezim Ridwan Zakaria Periode Kedua terhadap Penentuan Ibu Kota 71

D. Afirudin Mathara (2025–Sekarang): Melanjutkan Pengelolaan Dualisme Pusat Pemerintahan 72
1. Membangun Konfigurasi Politik Pemerintahan Afirudin Mathara 72
2. Melanjutkan Upaya Perubahan Status Ibu Kota 73
3. Perubahan Respons Masyarakat terhadap Polemik Ibu Kota 75
4. Implikasi Pemerintahan Afirudin Mathara terhadap Keberlanjutan Dualisme Pusat Pemerintahan 78

BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN KONFLIK DUALISME PUSAT PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BUTON UTARA 80

A. Dimensi Struktural sebagai Mekanisme Pengaturan Kelembagaan dan Fungsi Ruang 81
1. Pembedaan Fungsi Buranga dan Ereke dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 81
2. Pelembagaan Dualisme Pusat Pemerintahan melalui Kebijakan Tata Ruang 82
3. Distribusi Atribut Pemerintahan dan Keterwakilan Politik 83

B. Dimensi Nilai sebagai Mekanisme Akomodasi Makna dan Identitas Lokal 84

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Manajemen Konflik Dualisme Pusat Pemerintahan di Kabupaten Buton Utara
Inan Fauziyah, Dr. Indah Surya Wardhani, S.Sos., M.Sc
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

1. Mengakomodasi Perbedaan Makna Buranga dan Ereke sebagai Pusat Daerah 84
2. Mengakomodasi Identitas Lokal melalui Penguatan Lembaga Adat ... 87

C. Dimensi Kepentingan sebagai Mekanisme Distribusi Politik 89
1. Konvensi Politik dalam Distribusi Jabatan Birokrasi Berdasarkan Keterwakilan Politik Ereke dan Buranga 90
2. Konvensi Politik dalam Distribusi Bantuan Sosial kepada Seluruh Wilayah 91

D. Pengelolaan Dualisme Pusat Pemerintahan sebagai Strategi Manajemen Konflik Spasial 92

BAB V PENUTUP 95

A. Kesimpulan 95
B. Refleksi Penelitian 96

DAFTAR PUSTAKA 98